

BAB IV

PENUTUP

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE)

- a. Pemerintah Kabupaten Rembang telah menjalankan perannya sebagai regulator dalam menyediakan landasan kebijakan dan program yang jelas melalui regulasi daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sebagai dinamisator, Pemerintah Kabupaten Rembang telah berperan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sebagai fasilitator, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyediakan dukungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan sarana prasarana, bantuan sosial, pendampingan, dan penyediaan data. Peran sebagai katalisator juga telah dijalankan dengan meningkatkan sinergitas lintas sektoral.
- b. Peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Proses penyaluran bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

- c. Peran pemerintah terkendala pada proses validitas data yang disebabkan kualitas SDM dalam mengelola data, proses koordinasi antar OPD dan *stakeholder* yang masih lemah, serta proses monitoring dan keterlambatan pelaporan pelaksanaan program.

2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang

- a. Peran pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti validitas data, koordinasi, anggaran, sumber daya manusia, kondisi sosial dan budaya, dan infrastruktur.
- b. Peran pemerintah sebagai regulator memiliki pengaruh yang sangat besar karena merupakan langkah awal dalam menentukan arah kebijakan yang mencakup perencanaan program, anggaran, penyediaan data, dan penentuan strategi penanggulangan kemiskinan.
- c. Faktor yang menghambat yaitu keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang masih kurang, hambatan budaya seperti ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial dan resistensi perubahan juga menghambat peran pemerintah khususnya sebagai dinamisator, fasilitator, dan katalisator.

1.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kaitannya dengan peran Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE)

a. Peningkatan Akurasi Data dan Sistem Informasi Sosial

- 1) Memperkuat sistem pemutakhiran dan validasi data kemiskinan melalui integrasi teknologi informasi serta pelibatan partisipasi aktif masyarakat dan aparat desa guna menjamin akurasi data.
- 2) Melakukan pelatihan intensif bagi petugas pendataan di berbagai tingkatan agar pengelolaan data berjalan akurat dan terkini.
- 3) Melakukan proses seleksi yang ketat untuk admin atau petugas pengelola data
- 4) Melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya pengelolaan dan akurasi data untuk penentuan kebijakan serta arahan yang jelas dan tegas selama pendataan.

b. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Kelembagaan

- 1) Memperkuat peran TKPKD sebagai koordinator utama melalui peningkatan kapasitas kelembagaan serta memperbaiki mekanisme koordinasi antar OPD, pemerintah desa, dan mitra pelaksana program.

- 2) Mengoptimalkan kolaborasi multi-pihak antara pemerintah kabupaten, provinsi, dunia usaha (melalui CSR), dan lembaga masyarakat untuk memperluas sumber daya dan cakupan intervensi.

c. Pendampingan dan Pemberdayaan Berkelanjutan

- 1) Mendorong program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan pemberian akses modal yang terintegrasi dengan pasar jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga miskin.
- 2) Memberikan pendampingan teknis berkelanjutan di desa-desa prioritas
- 3) Melakukan sosialisasi kepada OPD pendamping desa dan penguatan pengawasan serta konsistensi pendampingan teknis di desa-desa prioritas.
- 4) Melakukan evaluasi dan pelaporan yang sistematis hasil pendampingan.

2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang

a. Menentukan Prioritas Anggaran

- 1) Melakukan peninjauan ulang program prioritas pemerintah dengan memfokuskan belanja pada program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan ekstrem

- 2) Optimalisasi sumber pendapatan daerah dari APBD, dana desa, dukungan program dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
 - 3) Menjalin kolaborasi dengan pihak diluar pemerintah sebagai mitra untuk mengatasi keterbatasan anggaran
- b. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Masyarakat
- 1) Melakukan intervensi psikososial dan penyuluhan untuk mengubah perilaku pasrah dan ketergantungan pada bantuan, serta meningkatkan motivasi masyarakat agar berorientasi pada pengembangan usaha dan investasi masa depan.
 - 2) Penguatan program pemberdayaan berbasis partisipasi aktif masyarakat
 - 3) Pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan untuk mengurangi resistensi terhadap program baru
- c. Perbaikan Sarana dan Prasarana
- 1) Mengalokasikan anggaran khusus pembangunan fasilitas umum seperti perumahan layak, sanitasi, air bersih, listrik, dan akses transportasi terutama di wilayah kantong kemiskinan yang geografisnya sulit dijangkau.